

BAB III

PEKALONGAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Pembentukan KNI Daerah Pekalongan

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat kembali yang memutuskan tiga persoalan pokok, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.¹ Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Presiden Soekarno menjelaskan bahwa tujuan Komite, antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa.²

Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dengan dibentuknya KNIP, tugas PPKI berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai daerah dari tingkat karesidenan sampai tingkat desa. KNI di setiap daerah ini menjadi satu-satunya badan penghubung antara Pemerintahan

¹ Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dapat di lihat di lampiran 1, Hlm. 138.

² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 163.

Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan pemerintah.

Menurut tokoh nasionalis Ibu Trimurti mengatakan,

Setelah proklamasi, terus saya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia. Jadi Komite Nasional Indonesia itu diadakan untuk membantu presiden sebelum ada parlemen dan lain-lainnya. Karena waktu itu yang dipilih baru presiden dan wakil presiden. Jadi, lantas Komite Nasional itu. Waktu itu Komite Nasional di daerah-daerah didirikan dengan sendirinya, di sini Komite Nasional Pusat.³

Dukungan juga dinyatakan oleh para pegawai Indonesia yang tadinya bekerja di jawatan-jawatan pemerintahan pendudukan Jepang. Pada tanggal 30 Agustus 1945 para pegawai ini disertai dengan anggota polisi mengadakan konferensi di Jakarta. Dalam konferensi ini mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan polisi Indonesia. Sejak itu mulailah mereka mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Di Pekalongan semua pejabat atau pegawai tunjukan Jepang secara resmi menyatakan sebagai pegawai sipil pemerintah Republik pada tanggal 27 September 1945.

Melalui kurir, kelompok pejuang memastikan bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan telah dilaksanakan. Kurir-kurir tersebut membawa ratusan teks proklamasi dan semboyan-semboyan yang tercetak di atas kertas merang rapuh berwarna kekuning-kuningan, satu-satunya jenis kertas yang tersedia saat itu. Tokoh-tokoh nasionalis senior perjuangan menjadi kokoh dengan kepastian kebenaran dari Jakarta atas desas-desus penyerahan Jepang.

³ Surastrri Karma Trimurti, "Sukarno Si Pria", Dalam Wild, Collin dan Peter Carey (Ed), *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 118.

Mereka cepat mengambil prakarsa menyuruh pemuda menaikkan bendera Merah Putih, lalu menjalankan kampanye propaganda kemerdekaan dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) sesuai dengan instruksi dari Jakarta.⁴

Pembentukan KNI di daerah tentu saja tidak sebaik di tingkat pusat, namun semangat pembentukan KNID yang perlu dibanggakan. Kesadaran masyarakat mengenai kalimat proklamasi yang berbunyi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka seperti di daerah lainnya di Indonesia, di Pekalongan dibentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu kepala daerah. KNI menghimpun berbagai kekuatan kelompok sosial untuk mempertahankan kemerdekaan nasional yang baru saja diproklamasikan.

Pada tanggal 28 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Pekalongan dengan badan pekerjaanya, sebagai badan eksekutif untuk membantu kepala daerah dan menampung aspirasi rakyat agar segala tindakan bisa terkoordinir. Adapun susunan anggota badan eksekutif Komite Nasional Indonesia, antara lain: Dr. Sumbadji sebagai ketua, Dr. Ma'as sebagai wakil

⁴ Anton E. Lucas, "One Soul One Struggle", a.b. Anton E. Lucas. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 89.

ketua, anggota-anggotanya yaitu, R. Suprpto, Kromo Lawi, A. Kadir Bakri, Kyai H. Moch. Ilyas, Jauhar Arifin, S. Wignyosuparto, dan H. Syiradj.⁵

Pangreh praja tidak mempunyai sumber informasi kecuali Jepang. Sikapnya yang menantikan pengumuman resmi atasan itu membuat kebingungan dan keragu-raguan terhadap proklamasi. Sedangkan pihak Jepang di Karesidenan Pekalongan tetap bungkam tentang penyerahan itu sampai kira-kira seminggu setelah proklamasi menolak untuk menjawab di depan umum, dan seringkali secara pribadi menyangkalnya.⁶ Pangreh praja yang tidak tahu apa yang harus diperbuat karena ketiadaan instruksi-instruksi dari atasan, bertingkah laku sangat hati-hati dan selalu birokratis serta menanti perintah-perintah atasan yang tak kunjung tiba.

Golongan pemuda elit revolusioner dan para nasionalis pragmatis yang lebih tua masing-masing berusaha memberi arahan menurut cara mereka masing-masing. Bagi kaum nasionalis tekanan utama adalah untuk merebut kekuasaan atas aparat pemeritnahan di Jawa. Hatta secara jelas menerangkan siasat yang dipakai dalam minggu-minggu pertama setelah proklamasi sebagai perebutan kekuasaan dari dalam, yaitu menciptakan suatu pemerintahan yang baru dan

⁵ Mochammad Aswan Tary, *Peristiwa Berdarah 3 Oktober 1945 Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan*. Pekalongan: (Tanpa Penerbit), 1984, hlm. 6.

⁶ Anton E. Lucas, *loc.cit.*

bertentangan dengan pihak Jepang. Ini akan mengakibatkan suatu perjuangan yang keras dan kemenangan belum tentu menjadi milik Indonesia.⁷

Proklamasi kemerdekaan tidak diketahui di semua daerah pada waktu yang bersamaan. Hal itu disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan adanya penyegelan radio yang dilakukan Jepang pada waktu sebelumnya. Akan tetapi dukungan daerah pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNI setempat. Keterlambatan pembentukan pemerintahan di beberapa daerah disebabkan oleh sikap Jepang yang berusaha menghalang-halangi atau oleh sikap ragu-ragu tokoh-tokoh setempat.

Untuk mengatasi sikap keragu-raguan pangreh praja, pada tanggal 30 Agustus 1945 di Jakarta berlangsung konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura, yang mencerminkan salah satu prioritas dari kaum nasionalis tua dalam kabinet pertama republik, untuk meyakinkan Sekutu bahwa republik adalah salah satu kenyataan, mereka harus mendemonstrasikan dukungan rakyat dan kewibawaan penguasa terhadap rakyat. Demi tujuan inilah, Soekarno-Hatta berusaha menghindari sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban ganda yaitu pemerintahan Jepang dan republik. Hatta juga menyatakan bahwa perintah-perintah telah dikeluarkan kepada semua pejabat pemerintah untuk menyatakan

⁷ Anthony J. S. Reid, "The Indonesian National Revolution", a.b. Pericles G. Katoppo. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 51.

dirinya sebagai pejabat Republik Indonesia dan siap sedia hanya menerima perintah-perintah yang diberikan dari atasan yang berkebangsaan Indonesia.⁸

Selain itu peranan residen sangat menentukan untuk menghadapi sikap pangreh praja yang menunggu perintah Jepang akan memberikan kemerdekaan maupun ada juga yang menunggu bahwa sekutu akan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Di Pekalongan, tanggal 12 September KNI Pekalongan baru mengajukan mosi kepada presiden Soekarno agar mengangkat Mr. Besar (bekas *Fuku Syuchokan*) sebagai residen.⁹ Pada tanggal 21 September Mr. Besar baru resmi diangkat sebagai residen Pekalongan. Dengan diangkatnya Mr. Besar sebagai residen, Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaannya di Pekalongan pada tanggal 27 September.

Karena pejabat-pejabat pangreh praja bersikap ragu-ragu, KNI yang harus menghadapi tentara Jepang pada waktu perebutan atau penyerahan senjata. Anggota Barisan Pelopor berpendapat bahwa KNI itu sebuah tempat yang

⁸ AntonE. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. op.cit.* hlm. 99.

⁹ Pada zaman pendudukan Jepang, jabatan residen ini merupakan jabatan fungsionaris tertinggi yang semula hanya dipegang oleh orang Jepang saja. Pada bulan Mei 1945, Mr. Besar diangkat menjadi asisten residen (*Fuku Shuchokan*) di Pekalongan. pada tanggal 12 September 1945 KNI Pekalongan mengajukan mosi agar mengangkat Mr. Besar sebagai Residen Pekalongan.

menghimpun anggota-anggota perjuangan setempat bila ingin bertemu. KNI adalah sebuah badan tempat suara rakyat dapat didengar dan diarahkan.¹⁰

Bagi KNI tugas yang paling berat adalah masalah ekonomi, pembagian bahan sandang dan pangan yang tersedia dari Jepang. Rakyat menganggap fungsi ekonomi ini sangatlah penting dan memberi legitimasi rakyat kepada KNI. Boleh dikatakan bahwa KNI adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat pada saat itu dan menjadi wadah kepemimpinan baru dari perjuangan revolusi kemerdekaan.¹¹

Pada peristiwa yang terjadi di Kebon Rojo tanggal 3 Oktober 1945, peranan KNI Daerah Pekalongan sangatlah penting dalam pengambilalihan kekuasaan yaitu dengan membentuk badan eksekutif untuk membantu tugas-tugas kepala daerah, melakukan perundingan awal dengan pihak Jepang untuk mengambilalih kekuasaan baik sipil maupun militer. Selain itu dapat menyatukan segala kekuatan masyarakat untuk menuju satu cita-cita bersama yaitu menegakkan kemerdekaan sepenuhnya. KNI Daerah Pekalongan selalu berkoordinasi dengan BPKKP dan para pemuda di Pekalongan.¹²

¹⁰ Nurdianto, dkk, *Kerusuhan di Pekalongan Jawa tengah tahun 1995-1999*. Semarang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004, hlm. 27.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹² Wawancara dengan Bapak Tasbun yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2013 di rumah beliau di Jalan Pantai Sari II, Pekalongan.

B. Pembentukan Kelompok-kelompok Pejuang

Ciri-ciri dari perjuangan kemerdekaan di waktu-waktu sesudah proklamasi yaitu berkembangnya apa yang disebut badan perjuangan. Pada umumnya badan-badan ini sulit disebut organisasi, karena struktur organisasi kaum muda sangat longgar dan biasanya mereka hanya mengelompok pada seseorang kelompok tua yang berkarisma.¹³

1. Kelompok Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Pekalongan

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia (KNI). Presiden berseru agar para bekas tentara Peta, Heiho, dan pemuda-pemuda lain memasuki BKR sambil menunggu dibentuknya tentara kebangsaan. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.

Resimen ke-17 berada di Karesidenan Pekalongan bersama-sama dengan Semarang, Pati, dan Salatiga tergabung dalam Divisi ke-IV, yang

¹³ Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. op.cit.*, hlm. 91.

bermarkas besar di Salatiga di bawah pimpinan Jenderal Djatikusumo.

Menurut Letnan Jenderal Djatikusumo,¹⁴

Kalau dikatakan bahwa kita yang memasuki PETA itu menjadi anteknya Jepang atau kita membantu Jepang, itu tidak benar. Karena kita sejak permulaan berniat untuk menyusun kekuatan bersenjata dan kesempatan itu diberikan. Saya tidak bisa menggambarkan sekiranya tidak ada PETA, bagaimana tahun '45 kita bisa menyusun tentara baru, katakan dari nol. Jadi, apa yang kita belajar dari PETA, dari Jepang itulah bagaimana menyusun tentara dari nol, dan itulah yang mengesankan daripada kita.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengumumkan terbentuknya sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR).¹⁵ Di dalam undang-undang pembentukannya, fungsi BKR disebutkan sebagai memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. BKR akan ditempatkan di bawah pengarah KNIP, dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di bawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.¹⁶

¹⁴ Djatikusumo, "Permulaan Terbentuknya Suatu Tentara", Dalam Wild, Collin dan Peter Carey (Ed), *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 81.

¹⁵ Lihat Lampiran Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945, Tentang Pembentukan PNI, BKR/BPKKP, dan KNI, pada lampiran 1, hlm. 138.

¹⁶ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 11.

Para pemuda mendirikan BKR di daerah masing-masing sebagai upaya menampung kekuatan masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat. Sebelum proklamasi pemuda-pemuda yang telah digembleng dalam Peta, Heiho, dan Barisan Pelopor inilah yang dengan penuh semangat dan keberanian mengadakan perlawanan terhadap tentara asing dengan hasil rampasan dari Jepang.¹⁷

Badan Keamanan Rakyat (BKR) dapat menjadi senjata yang sangat efektif bagi pemerintah jika berhasil meresap dengan lancar kesatuan-kesatuan *Giyugun* atau PETA dan Heiho yang dilatih Jepang. Tetapi dalam hal ini, pihak Jepang bersikap tegas demi keselamatan mereka sendiri serta tanggung jawab mereka pada Sekutu. Pada 18-22 Agustus 1945 semua kesatuan PETA dan *Giyugun* di Jawa, Bali, dan Sumatera dilucuti senjatanya dan disuruh pulang ke kampung halamannya.¹⁸

Dengan demikian kelanjutan pembentukan tentara semakin sulit. Pembentukan BKR harus benar-benar memulai baru lagi, tidak jauh berbeda dengan badan-badan perjuangan lainnya. Kekuatan BKR di setiap daerah bergantung pada inisiatif yang diperlihatkan para mantan perwira *Giyugun* setempat dalam menyusun kembali dan memimpin anak buah mereka. Pada

¹⁷ Chusnul Hajati, dkk, *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949: Daerah Kendal dan Salatiga*. Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hlm. 22.

¹⁸ Anthony J. S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia. op.cit.*, hlm. 54.

umumnya mereka bersikap lebih disiplin ketimbang pemuda-pemuda lainnya dan lebih siap menerima otoritas pejabat-pejabat setempat. Senjata-senjata mengalir dengan lancar dari tangan Jepang ke tangan Indonesia, terutama di daerah-daerah dimana terdapat kerja sama antara para pemimpin diplomatik yang dipercayai perwira-perwira Jepang setempat, dengan para pemuda.¹⁹

Apabila KNI merupakan satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkat pemerintahan, maka BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah.²⁰ Pengepungan *kempeitai* yang dimulai pada tanggal 4 Oktober di Pekalongan merupakan pertemuan kembali anggota BKR sejak pembubaran Peta. Beberapa hari kemudian sekembalinya BKR dari mengawal *kempeitai* dan orang-orang sipil Jepang dari Pekalongan ke Purwokerto, TKR di Pekalongan dibentuk.

Seperti halnya badan perjuangan lainnya ikatannya longgar. BKR bertugas untuk memelihara keamanan setempat. BKR memperoleh kantor yang bernama BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Pengurus BPKKP di Pekalongan, yang mendapat legalitas dari pemerintah Jepang untuk mengurus Keluarga Korban Perang terdiri dari Dr. Ma'as, M.A.L. Tobing, R. Sarpan, A. Kadir Bakri, Jauhar Arifin, dan Abdullah Soegondo. BPKKP juga sangat berperan dalam menyiarkan berita

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁰ Chusnul Hajati, dkk, *op.cit.*, hlm. 20.

proklamasi. Dengan menjadi pengurus BPKKP, mereka dapat menyebar menuju berbagai daerah, sehingga dalam beberapa saat berita proklamasi kemerdekaan tersampaikan ke seluruh penjuru daerah Karesidenan Pekalongan.²¹

BKR mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang setelah kegagalan perundingan di markas *kempeitai* yang menewaskan masyarakat Pekalongan di Lapangan Kebon Rojo. BKR menuntut gencatan senjata segera dimulai dan semua orang Jepang diminta menyerahkan senjatanya kepada BKR. Untuk menyelesaikan masalah ini, eks *Daidancho* Iskandar Idris meminta bantuan kepada eks *Daidancho* Sudirman di Purwokerto, dan terbukti dapat ditariknya tentara Jepang ke Purwokerto.

2. Kelompok Pemuda Pejuang di Pekalongan

Pemuda adalah seorang yang berjiwa revolusioner. Ukuran pemuda tidak tergantung pada umur, pendidikan, dan sudah kawin atau belum. Kebanyakan dari mereka memang anak muda yang seperti diuraikan tadi. Tentu juga arti jiwa revolusioner harus dilihat dalam konteks kebudayaan Indonesia. Misalnya salah satu nilai revolusioner pemuda waktu itu adalah menolak nilai hierarki dalam pergaulan sehari-hari yang tercermin terutama dalam penggunaan bahasa. Pada umumnya di Jawa pemuda menolak memakai bahasa Jawa *kromo* yang pada hakikatnya adalah bahasa

²¹ Mochammad Aswan Tary, *op.cit.*, hlm. 4-5.

penghormatan. Mereka lebih suka memakai bahasa *ngoko* seperti di rapat-rapat umum karena dianggap bahasanya tegas, lebih jelas, dan berani.

Penggunaan bahasa yang boleh dikatakan lebih demokratis mencerminkan nilai persamaan para pemuda waktu itu, atau dengan kata lain ideologi sama rata sama rasa. Kata rasa, merupakan sebuah kata Jawa yang artinya antara lain rasa kejiwaan. Sama rasa berarti kesamaan batin diantara pemuda dan rakyat yang berjuang bersama-sama. Semboyan ini berarti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebebasan bersama. Sedangkan sama rata artinya bahwa pembagian bahan tekstil atau beras sisa dari pendudukan Jepang setiap orang harus mendapat bagian yang sama jumlahnya.

Di Jawa dimana terjadi revolusi sosial, seperti di pantai utara Jawa Tengah yaitu di karesidenan Pekalongan, pemuda dan rakyat selalu didorong untuk menanggalkan penggunaan gelar seperti misalnya paduka yang mulia, abdi, ndoro, dan sebagainya, diganti dengan bung atau saudara. Sebagai salam digunakan kata-kata seperti “merdeka” sebagai ungkapan keberanian yang penuh harapan dan setia kawan. Semangat yang mendasari segala sesuatu yang dilakukan oleh pemuda pada waktu itu. Kalau seseorang tidak mempunyai semangat, maka ia tidak dianggap sebagai pemuda.²²

Menurut Sudjarwo, pemuda diartikan sebagai kelompok yang belum mapan kedudukan sosial, ekonomi, ataupun politiknya. Pemuda sebagai

²² Lucas, Anton, “Pemuda Revolusi”, Dalam Wild, Collin dan Peter Carey (Ed), *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 162.

generasi muda dipandang mempunyai sumbangan yang cukup besar, mengingat mereka sedang mencari identitas yang lebih universal sifatnya. Pemuda cukup mempunyai modal untuk mengambil bagian di dalam terjadinya revolusi. Revolusi merupakan istilah yang mengandung pengertian alat, cara bertindak, dan hasil tindakan itu sendiri. Revolusi merupakan gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah yang berkembang dalam masyarakat. Gagasan ini selanjutnya akan menimbulkan sejumlah tindakan yang dipandang revolusioner.²³

Selama revolusi ada beberapa ciri sifat perjuangan yang dianggap penting, diantaranya yaitu tugas jaga yang merupakan kewajiban yang dianggap sebagai kesadaran revolusioner. Sebagai imbalan tugas jaga di kota-kota kabupaten di Jawa, para pemuda menerima jatah nasi ponggol, yang terbungkus daun pisang dimasak di dapur umum. Ada beberapa pemuda yang dijuluki “pemuda ponggol” oleh seorang pemimpin, karena pemuda-pemuda itu malas untuk menggantikan tugas jaga rekannya apabila nasi ponggol belum ada.

Semakin terdesaknya posisi Jepang dalam perang menyebabkan mereka terpaksa memberikan konsesi kepada bangsa Indonesia dan memungkinkan para pemuda meningkatkan kegiatannya secara terbuka. Pada tanggal 16 Mei diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung,

²³ Sudjarwo. 1981. “Potret Diri Pemuda dalam Revolusi Kita”, *Prisma*, No. 8, Agustus Tahun ke X, hlm. 21.

yang menyelenggarakannya disponsori oleh Angkatan Moeda Indonesia. Angkatan Moeda Indonesia ini dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan 1944, tetapi kemudian berkembang menjadi suatu pergerakan pemuda yang anti Jepang. Para pemimpin Angkatan Moeda Indonesia di dalam kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa menganjurkan para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan hadiah Jepang.²⁴

Tahap-tahap terakhir perjuangan, setelah ambruknya kekuasaan Jepang, merupakan cerita interaksi antara diplomasi dan peperangan. Akan tetapi di belakang kaum politisi dan para prajurit profesional terdapat massa pemuda yang tidak sabar yang mendesak generasi yang lebih tua agar maju dengan semboyan “merdeka atau mati”.²⁵ Sesudah proklamasi pemudalah yang meneruskan nyala api proklamasi, api pertempuran dengan Jepang, api revolusi sosial yang menuntut Indonesia merdeka seratus persen tanpa berunding dan tanpa diplomasi dengan slogan “merdeka atau mati” mereka menuntut kebebasan.

Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta telah menjadi contoh bagi gerakan pemuda di kota-kota di seluruh Jawa. Di daerah, generasi tua pada

²⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 133.

²⁵ Lucas, Anton, “Pemuda Revolusi”, *op.cit.*, hlm. 157.

umumnya diwakili oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang dulunya pejabat pangreh praja, sehingga sikap keragu-raguan terhadap proklamasi tercermin dalam sikap mereka. Ada yang menunggu kedatangan sekutu, ada yang menunggu “majikan lama” yaitu Belanda untuk kembali. Ada pula yang menunggu pengumuman resmi *gunseikan* bahwa Jepang sudah menyerah secara resmi kepada Sekutu. Padahal pengumuman ini tidak pernah datang. Golongan ini masih ketakutan akan tindakan Jepang apabila mereka harus menurunkan bendera Hinomaru Jepang. Pemudalah yang memaksa mengibarkan bendera Merah Putih dan seringkali merekalah yang menurunkan bendera Jepang, sehingga akhirnya bendera Merah Putih berkibar tanpa bendera Jepang disampingnya.²⁶

Pasca proklamasi kemerdekaan di Semarang didirikan Angkatan Muda untuk menghimpun kekuatan rakyat guna kepentingan perjuangan. Berdirinya angkatan muda di Semarang segera diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa Tengah termasuk Pekalongan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Angkatan Muda dapat didirikan dan para pemuda mengambil peranan penting dalam perjuangan.²⁷

Pertempuran pemuda tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Pertempuran dimulai dengan menyerang garnisun Jepang yang masih tinggal

²⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Fadholi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah beliau di Jalan Hayam Wuruk, Sampangan Gg.10, Pekalongan.

di kota-kota kabupaten dan karesidenan, dengan maksud untuk merebut senjata-senjata Jepang. Pertempuran ini memakan korban jiwa. Di Pekalongan pertempuran yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 1945 yang menelan 37 jiwa pemuda. Selama pertempuran itu, pemuda dan rakyat membalas hanya dengan pisau atau keris dan bambu runcing di tangannya.

Tradisi pemuda adalah sebagian dari tradisi protes sosial di Indonesia. Tradisi ini juga hidup di pesantren-pesantren, dimana pemudalah yang datang untuk belajar dengan seorang kyai yang terkenal sebagai ahli silat, tau memiliki ilmu (bahasa Jawa *ngelmu*) yang sering disebut ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu rahasia. Para jago-jago dan guru sekolah di tingkat pedesaan juga mengemban tradisi protes sosial melawan Belanda maupun pangreh praja.

Tahun 30-an gerakan pemuda memang sudah nampak. Sebelum perang sudah ada organisasi pergerakan pemuda seperti Indonesia Muda, PERPRI (Persatuan Pemuda Republik Indonesia) yaitu ormas pemudanya Partindo yang berbasis di Solo, dan SPI (Suluh Pemuda Indonesia) ormas pemudanya PNI-Baru (PNI Sjahrir dan Hatta yang didirikan tahun 1933). Pada tahun 1945 mereka juga tampil ke depan di kota-kota besar dan punya peranan di tingkat nasional. Mereka sering disebut pemuda sekolah karena mereka berpendidikan Barat. Mereka tidak jarang menjadi pemimpin badan perjuangan di daerah, seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang

pusatnya di Jakarta, AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) di Semarang, dan PRI (Pemuda Rakyat Indonesia) di Surabaya.

Pada permulaan berdirinya negara ini, pemimpin bangsa sibuk menyusun jaringan-jaringan pemerintahan dalam rangka menegakkan negara untuk melibatkan seluruh rakyat, pemuda pun sibuk mengatur barisannya sendiri untuk bersiap-siap menghadapi perubahan baru. Sedangkan pihak Jepang saat itu masih tetap bersenjata lengkap menjadi bahaya bagi pemuda. Karena Jepang disertai Sekutu untuk mengamankan daerah ini sebelum mereka datang. Selain itu juga pemerintahan Indonesia belum mengeluarkan tindakan apa-apa terhadap pihak Jepang.²⁸

Generasi pemuda angkatan 1945 ini memperoleh pengalaman politik dari organisasi-organisasi pemuda yang dibuat Jepang. Pemuda-pemuda ini sebagian besar menjadi anggota Barisan Pelopor. Para aktivis Barisan Pelopor di Kota Pekalongan merupakan pemuda sekolah yang berpendidikan. Di Kota Pekalongan karena adanya beberapa pesantren di Pekalongan bagian selatan, menjadikan hampir semua anggota AMRI adalah santri.²⁹

²⁸ Sudjarwo, *op.cit.*, hlm. 30.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Fadholi dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013 di rumah beliau di Jalan Hayam Wuruk Sampangan Gg.10, Pekalongan.

Pemuda AMRI di bawah pimpinan A. Djoenaid³⁰, meneriakkan yel-yel kemerdekaan sepanjang jalan kota layaknya barisan para ksatria. Mereka aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar gedung-gedung pemerintah, misalnya dengan mengibarkan bendera di depan Kantor Pengadilan Negeri. Namun akhirnya terpaksa menurunkan bendera Merah Putih yang telah mereka naikkan hanya karena digertak oleh perintah Jaksa Suprpto, tokoh terkemuka kalangan priyayi Pekalongan.³¹

Mereka sering mendapat cibiran atau julukan sebagai kelompok tamasya dan Sepak Bola (piknik dan bal-balan), karena sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak pengusaha atau golongan menengah kota Pekalongan dan biasa hidup senang. Banyak yang bilang bahwa mereka tidak berani menantang penderitaan. Citra keberanian masih melekat pada figur-figur nasionalis seperti Sarli, Kromo Lawi, dan Soebagio Mangoenhardjo. Barisan Pelopor yang dipimpin orang baru juga belum berhasil meluaskan pengaruh ke kalangan mayoritas santri dan buruh. Tokoh-tokoh AMRI yang kurang senang terhadap cibiran-cibiran yang diarahkan kepada mereka lantas menjalin kerja sama dengan Barisan Pelopor, mereka bahu-membahu mengambilalih sebuah pabrik penggilingan

³⁰ Foto A.Djoenaid dapat di lihat pada lampiran 21, Gambar 7, hlm. 171.

³¹ Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. op.cit.*, hlm 102.

padi dan menjual beras Komite Nasional Indonesia agar bisa disebar secara luas dengan harga pantas.

Berbeda dengan AMRI sebagian pemuda-pemuda priyayi yang tergabung dalam Pemuda Permi (Persatuan Muslim Indonesia) justru lebih aktif ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagian dari anggotanya adalah pelajar sekolah menengah pertama (MULO), yang terdiri dari anak-anak priyayi Pekalongan yang tinggal di Jalan Permi. Mereka beranggapan, sopan santun dan kepatuhan yang terkait dengan status sosial sudah usang. Mereka menjalin hubungan dengan kelompok mahasiswa yang bemarkas di Jalan Prapatan 10 Jakarta, sehingga banyak mendapatkan suplai bahan untuk kampanye kemerdekaan. Selain gencar menyebarkan poster bertuliskan “Merdeka atau Mati” para anggota Permi pun dengan gigih menurunkan Hinomaru dan menaikkan Merah Putih. Tidak tanggung-tanggung Pemuda Permi bahkan bergerak untuk melucuti bendera Jepang di halaman kantor karesidenan dan menggantinya dengan Merah Putih di depan mata pejabat Jepang.

Aksi mereka mengundang marah Tuan Residen Tokonami Tokogi yang segera meminta penjelasan kepada wakilnya Mr. Besar selaku *Fuku Syuchokan* (wakil residen) yang lantas memanggil para anggota Komite Nasional Indonesia untuk menggelar rapat kilat. Di hadapan para peserta rapat, Mr. Besar menyampaikan amarah Tuan Residen atas penghinaan yang dilakukan para pemuda dengan penurunan Hinomaru. Mr. Besar mengatakan

andai kata para pejabat Indonesia mendukung aksi Pemuda Permi itu, sementara kenyataan Jepang masih memegang senjata. Mr. Besar juga meminta peserta rapat untuk mengerti perasaan orang-orang Jepang. Karena sungguh merupakan penghinaan besar bagi orang-orang Jepang menyaksikan benderanya diturunkan, dalam kondisi mental tergoncang akibat kekalahan perang.³²

Rapat kilat itu akhirnya ditutup dengan kata sepakat menurunkan bendera Merah Putih dan menaikkan kembali bendera Jepang. Dipimpin Mr. Besar para pejabat dan Anggota Komite Nasional serentak bergerak ke halaman. Di sana mereka disambut cemooh dan sorakan Pemuda Permi dan massa rakyat terus berdatangan. Keadaan bertambah tegang ketika sepasukan serdadu Jepang tiba dengan menyandang senapan laras panjang. Pemimpin Komite Nasional Indonesia meminta tokoh-tokoh Pemuda Permi menurunkan Merah-Putih dan menaikkan kembali bendera Jepang. Namun, salah seorang Pemimpin Pemuda Permi menolak dan mengatakan bahwa mengibarkan bendera adalah sikap mereka.

Pemimpin Komite Nasional Indonesia kebingungan. Dalam hati ia memuji keberanian dan keteguhan para pemuda dalam membela kemerdekaan negara, di pihak lain ia juga menyadari bahwa penyerahan kekuasaan dari Jepang belum dilakukan secara resmi. Demi menghindari

³² *Ibid.*

bentrok antara pemuda dan serdadu Jepang, akhirnya ia mencoba menempuh jalan tengah yang aman.

Pemimpin Komite Nasional Indonesia kemudian berkata kepada para Pemuda:

“Baiklah saya hargai sikap kalian, Saya tidak akan memaksa kalian menurunkan bendera itu. Tapi marilah kita hargai juga perasaan orang-orang Jepang. Keberadaan mereka disini mungkin bukan karena pilihan. Banyak orang tak bebas menentukan pilihannya, meski mereka hidup di negara merdeka. Mereka tidak beda dari kita, hanyalah warga negara yang mencoba berbakti kepada tanah air dan bangsanya. Kehendak berbakti selalu berhubungan dengan harga diri. Dan orang rela melakukan apa saja demi membela harga dirinya. Kalian telah dengan gagah membela harga diri bangsa Indonesia. Itu sungguh mulia. Tapi, akan lebih mulia jika kalian juga memberi kesempatan orang-orang Jepang untuk menyelamatkan harga diri mereka dari bangsanya. Sebagai orang tua, saya bangga jika anak-anak muda lain bisa meneladani kalian, berjuang dengan cara-cara mulia.”³³

Maksud dari Perkataan pemimpin KNI adalah beliau tidak ingin terjadi bentrok antara pemuda dan serdadu Jepang yang pada waktu itu masih bersenjata lengkap. Selain itu karena belum ada perbincangan secara resmi antara wakil-wakil Pekalongan dengan pihak Jepang untuk penyerahan kekuasaan, sehingga ketua KNI harus membujuk para pemuda untuk menurunkan kembali bendera Merah Putih agar tidak terjadi korban jiwa.

Setelah mendengar petuah panjang itu, para tokoh Pemuda Permi menyetujui penurunan kembali Merah Putih, asal bukan mereka yang

³³ Wawancara dengan Ibu Maemunah yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2013 di rumah beliau di Kandang Panjang Gg.7B Pekalongan.

melakukan. Para pejabat membujuk para pegawai Kantor Karesidenan untuk menukar bendera Merah Putih dengan bendera Jepang. Para pegawai pribumi menyatakan tak berani dengan alasan takut dikecam karena, di luar jam kerja, mereka akan kembali menjadi bagian masyarakat yang sedang bersemangat menyambut berita kemerdekaan.

Setelah insiden ini, berlangsunglah pertemuan antara Mr. Besar, KNI, dan *Syuchokan* (Residen Jepang). Dalam pertemuan itu disepakati tiada bendera Jepang maupun Indonesia akan dikibarkan di luar kantor.³⁴ Dengan dalih kesetiaan pegawai, juga rasa saling hormat dan saling pengertian antara kaum pendatang dan pribumi, ia pun meminta wakil serdadu Jepang ikut melakukannya bersama-sama.

Organisasi-organisasi pemuda ini lebih tepat disebut kelompok yang banyak ragamnya. Organisasinya ada yang tersusun baik, tetapi ada juga yang ikatannya longgar, bahkan ada yang tidak bernama. Sering juga tidak ada hubungannya antara satu sama lainnya, dan keanggotaan badan-badan ini tidak ketat dan bisa dirangkap. Bahkan nama-nama sering diambil dari kelompok-kelompok terkenal di Jakarta, Semarang, dan Surabaya tanpa adanya suatu ikatan organisasi. Tugas pemuda misalnya ikut dalam jaga malam, jaga jalan, jaga kantor. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan dimana mereka harus berada tanpa perintah. Anggota badan perjuangan

³⁴ Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. op.cit.*, hlm. 104.

pemuda sering disebut pemuda rakyat. Pemuda rakyat pada tahun 1945 umumnya adalah pemuda non-elit yang miskin dari kampung dan desa pinggiran kota-kota.³⁵

3. Kelompok-kelompok Pejuang Lain

a. Aktivis Jawatan Kereta Api

Kereta Api merupakan transportasi yang memegang peranan penting dalam setiap kegiatan manusia. Pada zaman kolonial Belanda, kereta api digunakan sebagai sarana angkutan hasil-hasil bumi dari daerah satu ke daerah lainnya yang jaraknya cukup jauh. Situasi negara Indonesia saat proklamasi kemerdekaan juga sangat bergantung pada transportasi. Meskipun perang terjadi di berbagai daerah, tidak seorang pun awak kereta api seperti masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi, dan pegawai lainnya merasa takut menjalankan tugasnya.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Sarekat Sekerja Kereta Api di Pekalongan dibentuk. Perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pihak militer. Pihak kereta api juga berjasa dalam melakukan perlawanan kepada pihak pemerintahan Jepang yang masih berkuasa di Indonesia meskipun telah kalah melawan Sekutu pada perang Dunia II. Tindakan mereka mengadakan rapat buruh kereta api dan untuk mengokohkan hubungan antar anggota dibuat brosur *Suara Rakyat*. Isi brosur yaitu mengajak masyarakat untuk

³⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

merebut senjata dan lembaga Jepang. Hal ini dikarenakan Indonesia telah berdaulat, maka kekuasaan harus ada di tangan rakyat Indonesia.³⁶

Pada tahap pertama revolusi di Pekalongan, para aktivis Jawatan Kereta Api yang paling menonjol dengan memeriksa penumpang-penumpang apakah sudah memakai lencana Merah Putih. Mereka juga mendirikan sebuah menara besar di depan stasiun untuk mengibarkan Sang Dwiwarna.³⁷ Selain itu ada juga pekerja kereta api yang mendapatkan kiriman satu pak besar yang ternyata berisi teks proklamasi kemerdekaan untuk disebarluaskan ke seluruh stasiun-stasiun kereta api di Jawa Tengah, termasuk di Pekalongan.

Serangkaian peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan RI ternyata belum sepenuhnya menjadikan kereta api Indonesia terbebas dari kekuasaan Jepang. Pada tanggal 20 Agustus 1945, kereta api Indonesia membentuk Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA). Mereka berhasil mengambil alih kekuasaan kantor kereta api di Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 28 September 1945 kekuasaan pucuk pimpinan perkeretaapian dapat direbut dari tangan Jepang.

³⁶ Sudjarwo, *loc.cit.*

³⁷ Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. op.cit.*, hlm. 102.

b. Kepolisian Negara

Alat pertahanan keamanan lainnya adalah Kepolisian Negara. Pemerintahan pendudukan Jepang telah mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi kepolisian di Indonesia. Perubahan-perubahan itu diantaranya melepaskan hak kepolisian dari tangan Pamong Praja, sehingga mereka tidak lagi dapat menangkap orang. Polisilah yang dapat menjalankannya. Meletakkan pimpinan atas organisasi *Keibodan* (organisasi semacam Hansip) di atas pundak Kepolisian. Melatih anggota-anggota Kepolisian dalam bidang kemiliteran agar mereka mampu untuk membantu tentara Jepang melakukan gerak atau operasi perangnya.³⁸

Tindakan-tindakan tersebut sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, yang merupakan salah satu kekuatan pendobrak bagi kelahiran proklamasi kemerdekaan. Setiap anggota Kepolisian mengalami pergolakan mental yang senantiasa digembleng untuk menjadi pemimpin rakyat. Pusat-pusat kepolisian untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, untuk Sumatera berpusat di Bukittinggi, untuk Indonesia Bagian Timur berpusat di Makasar, sedangkan untuk Kalimantan berpusat di Banjarmasin.

³⁸ Memet Tanumidjaja, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1971, hlm. 2.

Berbeda dengan Peta dan Heiho, kesatuan-kesatuan polisi tidak dibubarkan oleh Jepang. Senjata mereka pun tidak dilucuti. Kesatuan-kesatuan inilah yang ditransformasikan menjadi Kepolisian Negara.³⁹ Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 diambil keputusan bahwa polisi termasuk lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan sebutan Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung tanggal 29 September 1945, mengangkat Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo⁴⁰ menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Berita proklamasi yang berkembang hingga pelosok negeri, menjadikan masyarakat menuntut untuk mengambilalih kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Pada saat itu Kepolisian dengan Badan Polisi Istimewanya (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) merupakan satu-satunya instansi yang masih

³⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 182.

⁴⁰ Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo mengawali karir kepolisiannya dengan melamar ke Sekolah Aspiran Komisaris Polisi (*Aspirant Commisaris Vant Politie*) di Sukabumi. Soekanto dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara pada tanggal 29 September 1945 sampai 17 Desember 1959. Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk., *Ensiklopedi Kapolri Jenderal Polisi R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo Kapolri Ke-I Periode Tahun 1945-1959*. Jakarta: Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri, 2007, hlm. 25.

diizinkan memegang senjata api.⁴¹ Maka dengan menggunakan Kepolisian sebagai modal kekuatan, rakyat berhasil merampas senjata dari Jepang baik dengan jalan damai maupun dengan jalan kekerasan. Senjata hasil rampasan itu kemudian menjadi milik dari berbagai badan perjuangan.⁴²

Kepolisian merupakan lembaga yang ikut aktif dalam merebut kekuasaan dari tentara Jepang bahkan di beberapa daerah merupakan pelopor-pelopori utama dalam tindakan penurunan bendera Jepang dan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Di Kantor Pusat Kepolisian Kota Semarang di Bojong, polisi Indonesia mengetahui berita kekalahan Jepang dan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Polisi Indonesia disuruh berkumpul oleh Jepang, tetapi yang muncul kemudian memberikan *briefing* adalah orang Indonesia bernama Pak Soeprapto. Beliau memberitahu bahwa Jepang sudah kalah perang dan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta kemarin.

⁴¹ Tujuan Jepang yang masih mengizinkan Kepolisian atau Badan Polisi Istimewanya (*Tokubetsu Keisatsu Tai*) memegang senjata api adalah bahwa Jepang hendak memperlakukakan Kepolisian untuk mempertahankan kekuasaannya sebelum penyerahan kepada Sekutu atau Jepang masih menjaga status quo hingga Sekutu datang. Namun, meskipun kurang terkoordinasi kesatuan-kesatuan Kepolisian bersama dengan barisan-barisan pemuda mampu menggempur Jepang.

⁴² Memet Tanumidjaja, *op.cit.*, hlm. 26.

Beliau menghimbau agar kita hanya patuh kepada pemerintahan Indonesia dan kita orang Indonesia diperintahkan oleh pemerintah untuk mengambilalih pemerintahan dari orang Jepang. Menurut Hoegeng, meskipun gaya *briefing* Pak Soeprapto seperti bercakap-cakap biasa tetapi begitu mempesona, membakar semangat, dan akal sehat. Pagi itu juga lencana-lencana Hinomaru resmi dicopot dari topi pet polisi, lalu diganti dengan lencana Merah Putih segi empat. Di mana-mana kemudian terjadi pengambilalihan kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang.⁴³

Perbedaan sikap dan konflik dengan Jepang baru terjadi ketika pemuda-pemuda Indonesia berkeras untuk mengambilalih senjata orang Jepang. Para pemuda memerlukan senjata untuk bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan penjajahan Belanda kembali karena Jepang sudah kalah perang. Jepang mulai kesal karena sering terjadinya pencurian senjata, padahal senjata-senjata itu merupakan barang-barang inventaris perang yang harus mereka serahkan kepada Sekutu yang akan datang ke Indonesia.⁴⁴

Jepang hanya memberikan sebagian persenjataannya, tetapi tidak untuk seluruh persenjataan yang berada di tangan serdadu Jepang atau

⁴³ Abrar Yusra dan Ramadhan KH, *Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan (Sebuah Autobiografi)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 124.

⁴⁴ *Ibid.*

yang menumpuk di gudang-gudang. Para pemuda Indonesia yang mulai dijangkiti demam revolusi merasa tidak puas kepada pihak Jepang. Minggu-minggu pertama sesudah proklamasi diumumkan, Kantor kepolisian penuh dengan pengaduan tentang situasi pengambilalihan pemerintahan dari tangan Jepang dan juga soal-soal persenjataan. Kepolisian juga turun tangan ke lapangan menghadapi tuntutan-tuntutan para pemuda pejuang yang memerlukan konsultasi.

Di Pekalongan, setelah rakyat mendengar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, di kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah segera dipasang Bendera Merah Putih. Pengambilalihan kekuasaan dan senjata di Pekalongan mendapat kesulitan, karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya begitu saja. Walaupun awalnya dilakukan melalui perundingan, namun tiba-tiba Jepang memulai dengan menembaki massa yang hadir di Lapangan Kebon Rojo yang berada di depan markas *kempeitai* (tempat perundingan dilaksanakan). Akhirnya pemuda dibantu oleh Polisi dan badan perjuangan lainnya terpaksa berperang melawan Jepang, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Tugas Kepolisian yang di masa penjajahan merupakan alat kekuasaan pemerintah Kolonial, sekarang mulai ditujukan kepada suatu alat kepolisian yang dapat memenuhi keadaan dan panggilan masa, menjadi alat yang layak dalam suatu negara merdeka dan demokratis.

Tujuan daripada tugas Kepolisian RI terkandung dalam lencana Polisi Negara berupa lukisan yaitu *Tiang* yang melambangkan Polisi sebagai salah satu tiang negara yang kokoh, *Suluh* (obor) melambangkan Polisi sebagai penyuluh yang menerangi segala lapisan masyarakat, *Padi* melambangkan Polisi sebagai alat negara yang mempertahankan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial, dan *Bintang Berpaku Lima* melambangkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu pancasila.⁴⁵

⁴⁵ Memet Tanumidjaja, *op.cit.*, hlm. 19.